

## MEWUJUDKAN TRANSPARANSI MELALUI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK: STUDI KASUS FESTIVAL ANGGARAN KABUPATEN BATANG

Andra B. A. Firhansyah, Annisa Supriyatna, Bunga Rayhan Jannah, Khalisha Rami Yamsri  
Departemen Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia,  
Jalan Prof. DR. Selo Soemardjan, Kota Depok, Jawa Barat 16424, Indonesia.

### ABSTRAK

Aktualisasi keterbukaan akses bagi masyarakat terhadap informasi mengenai hal-hal yang dilakukan oleh pemerintah, termasuk anggaran dan program kerja yang dijalankan, merupakan perihal esensial dan menjadi pilar bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu pemerintahan yang transparan dan bersih dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Yoyok Riyo Sudibyo, Bupati Kabupaten Batang, pada masa jabatannya, telah berhasil mewujudkan hal tersebut melalui program Festival Anggaran yang dipelopori olehnya. Festival Anggaran utamanya diinisiasikan untuk mereformasi praktik pemerintahan Kabupaten Batang melalui skema keterbukaan informasi dan data publik dalam rangka memberantas tindak penyelewengan yang marak terjadi. Implementasi program tersebut juga menjadi ajang bagi pemerintah dalam menghimpun peran serta masyarakat secara aktif. Tulisan ini membahas implementasi program yang mewujudkan cita-cita Yoyok Riyo Sudibyo dalam merealisasikan pemerintahan yang transparan dan memuat partisipasi masyarakat dalam program pembangunan Kabupaten Batang pada masa kepemimpinannya. Untuk mendukung analisis implementasi, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode tinjauan pustaka selama proses penulisan.

**Kata Kunci:** Transparansi, Keterbukaan Informasi Publik, Partisipasi Masyarakat, Yoyok Riyo Sudibyo, Kabupaten Batang, Festival Anggaran

### PENDAHULUAN

Di era demokrasi saat ini, transparansi informasi publik menjadi hal yang sangat penting dalam menjaga integritas dan kredibilitas pemerintahan. Upaya untuk mengakses informasi tentang kebijakan, penganggaran, dan program-program yang dijalankan pemerintah, serta mengetahui proses dalam pengambilan keputusan publik merupakan hak dasar yang harus dijamin untuk setiap warga negara. Keterbukaan informasi publik terutama terkait kebijakan oleh pemerintah harus mudah diakses oleh seluruh kalangan masyarakat untuk dapat mewujudkan transparansi dan mewujudkan pemerintahan yang bersih (Kemenparekraf, 2023). Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mulai diberlakukan pada 30 April 2010, merupakan dasar hukum yang memungkinkan masyarakat memperoleh informasi publik. Tujuan dari undang-undang ini adalah menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta untuk membantu memahami dengan lebih baik alasan mengapa kebijakan tersebut dilakukan. Undang-Undang tersebut mengikat kepada seluruh masyarakat untuk secara langsung mengawasi pemerintah melalui keterbukaan informasi publik serta menuntut seluruh pihak untuk memastikan bahwa pengelolaan informasi dan transparansi sejalan dengan prinsip good governance, tata kelola yang baik, dan akuntabel.

Namun, dalam pelaksanaannya pada pemerintahan di tingkat kabupaten, masih terdapat masalah yang signifikan yaitu kurangnya transparansi. Transparansi sering kali dianggap hanya sekedar alat untuk menarik perhatian publik karena pemimpin daerah cenderung enggan terbuka dengan kondisi daerah yang sedang dipimpin (Tahir, 2013). Meskipun beberapa pemerintah daerah masih memiliki tingkat transparansi yang rendah, dalam penelitian Leisher & Nachuk (2006), tercatat semakin banyak pemerintah daerah yang menunjukkan kemajuan dalam mendorong reformasi inovatif dalam pemberian layanan informasi dan transparansi. Hal ini diperburuk dengan ancaman terjadinya tindakan korupsi dari kurangnya transparansi. Dalam penelitian oleh Cinintya (2022), tingkat transparansi pemerintah daerah memiliki pengaruh terhadap tingkat korupsi. Pemahaman akan dampak negatif yaitu pelayanan publik

yang buruk akibat proses penganggaran dan praktik korupsi oleh Bupati Batang periode 2012-2017, Yoyok Sudibyo, mendorongnya untuk menciptakan gagasan baru untuk mewujudkan transparansi melalui keterbukaan informasi dengan membuat program Festival Anggaran di Kabupaten Batang. Program tersebut bertujuan untuk meningkatkan transparansi proses penganggaran serta mendorong partisipasi masyarakat dengan meningkatkan kesadaran terhadap permasalahan publik dan program pemerintah (Arif & Indriastuti, 2017).

Melalui program Festival Anggaran, Bupati Yoyok dapat meningkatkan transparansi serta tata kelola Pemerintah Kabupaten Batang secara meluruh melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam mengawasi anggaran, serta perwujudan UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yaitu masyarakat berhak mengetahui rencana dan kebijakan yang dijalankan, bagaimana proses pengambilan keputusan dan penganggaran dibuat, serta memahami alasan mengapa Pemkab Batang memilih untuk melakukan kebijakan tersebut. Penulisan ini dipandu oleh pertanyaan riset sebagai berikut :

*“Bagaimana proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan Festival Anggaran Kabupaten Batang, dan sejauh mana dampak yang dihasilkan sesuai dengan tujuan awal?”*

## TINJAUAN LITERATUR

### Transparansi dan Keterbukaan Informasi Publik

Salah satu sasaran utama penyelenggaraan tata kelola yang baik adalah memperoleh kepercayaan publik. Perolehan kepercayaan tercipta ketika pemerintah mampu memberikan pertanggungjawaban kinerjanya menggunakan prinsip-prinsip keterbukaan atau transparansi. *The Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) mengartikan transparansi sebagai elemen kunci terwujudnya *good governance* melalui keterbukaan tujuan, perumusan, dan implementasi kebijakan yang dirancang oleh pemerintah. Manifestasi transparansi dalam birokrasi tercermin dalam keterbukaan informasi publik. Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan alat yang digunakan untuk melaksanakan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara, badan publik, dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik secara optimal. Di Indonesia, implementasi keterbukaan termuat dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan tujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu penyelenggaraan yang transparan, efektif dan efisien, serta akuntabel. Konsep keterbukaan informasi publik memiliki maksud untuk meningkatkan kepercayaan, mekanisme pengelolaan, dan pelayanan informasi di lingkungan publik, privat, dan masyarakat dalam rangka menghasilkan layanan informasi yang akurat dan memadai (*accurate and adequate*). Sejalan dengan kerangka tersebut, keterbukaan informasi publik merupakan salah satu karakteristik negara yang menjunjung hak dan kedaulatan rakyat.

## METODE PENULISAN

Metode dalam penulisan menggunakan pendekatan kualitatif dengan pemaparan deskriptif yang mengaitkan teori "Transparansi Melalui Keterbukaan Informasi Publik" dengan analisis studi kasus Festival Anggaran di Kabupaten Batang. Fokus terhadap studi kasus tersebut sebagai landasan untuk memahami implementasi praktik transparansi melalui keterbukaan informasi publik.

## PEMBAHASAN

Sukses keterbukaan informasi publik Kabupaten Batang di bawah kepemimpinan Bupati Yoyok Sudibyo dan Wakil Bupati Sutadi merupakan realisasi pemugaran pra kepemimpinan Kabupaten Batang yang sarat akan penyelewengan anggaran. Isu klasik yang menjadi titik awal transformasi tata kelola ini membuat Kabupaten Batang mendapat perhatian

khusus. Spesifiknya, sorotan tersebut datang pasca terkuaknya kasus korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Batang. Sayangnya, kasus ini justru melibatkan pejabat di jajaran eksekutif hingga legislatif. Bambang Bintoro, Mantan Bupati Kabupaten Batang periode 2002–2012, merupakan salah satu tersangka kasus penyelewengan APBD tahun 2004 dalam dana asuransi anggota dewan. Klaim dana yang seharusnya dikembalikan ke dalam kas daerah malah dibagikan kepada pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Batang sebagai insentif purna bakti. Dilansir dari laman *Indonesia Corruption Watch*, dengan tersingkapnya kecurangan ini, Mantan Ketua DPRD Batang saat itu juga ikut terseret menjadi tersangka.

Tidak berhenti di situ, Komisi Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN) Provinsi Jawa Tengah memberikan laporan penanganan kasus korupsi oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jawa Tengah sebanyak 120 perkara dengan total 112 terdakwa pada pertengahan 2012 melibatkan sejumlah kabupaten/kota di Jawa Tengah. Berdasarkan laporan ini, Kabupaten Batang menempati peringkat pertama dengan perkara korupsi terbanyak, yaitu 8 perkara. Informasi tersebut menunjukkan buruknya pengelolaan anggaran pemerintah Kabupaten Batang dan minimnya integritas yang dimiliki oleh pelaksana birokrasi.

Atas kausal tersebut, Bupati Yoyok bersama wakilnya menyusun visi dan misi yang fokus pada reformasi tata kelola sekaligus eliminasi praktik kecurangan pengelolaan program kerja dan anggaran daerah dengan memperkuat transparansi dan akuntabilitas. Perwujudan transparansi dan akuntabilitas sebagai elemen *good governance*<sup>1</sup> tersebut salah satunya diimplementasikan melalui program Festival Anggaran. Pelaksanaan Festival Anggaran Batang sebagai inovasi pelayanan publik merupakan langkah implementasi UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta aksi laten pemerintah Kabupaten Batang dalam mengaktualisasi UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Selama periode pemerintahan Yoyok–Sutadi, Program Festival Anggaran dilakukan sebanyak dua kali, yaitu di tahun 2014 dan 2016. Mulanya, inisiasi keterbukaan tersebut dijalankan melalui penyebaran brosur hingga pelaksanaan rapat akbar. Akan tetapi, Yoyok menilai cara ini tidak memberikan perubahan yang signifikan terhadap agenda transparansi yang diinginkan. Oleh sebab itu, Festival Anggaran diselenggarakan dengan memuat pelibatan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan pemerintah desa dalam bentuk forum besar dan pameran data. Teknis pelaksanaan keterbukaan informasi dalam festival ini menggunakan konsep *booth* yang diperuntukan bagi tiap-tiap SKPD terkait untuk memaparkan informasi yang merepresentasikan bidang pengelolaannya, yaitu bidang pengelolaan keuangan daerah, pembangunan infrastruktur urusan wajib, pelaksanaan pelayanan publik, serta bidang penyelenggaraan pembangunan desa.<sup>2</sup> Secara garis besar, *booth* yang didirikan tersebut akan memberikan transparansi mengenai program kerja di tahun anggaran, anggaran yang dikururkan bagi tiap SKPD, serapan dan belanja anggaran, juga capaian oleh SKPD.<sup>3</sup>

Selain sebagai sarana pemenuhan janji birokrasi bersih, Festival Anggaran juga diinovasikan untuk meningkatkan minat dan partisipasi masyarakat terhadap kondisi pemerintahan Kabupaten Batang. Transparansi dan akuntabilitas sebuah birokrasi tidak dapat dilepaskan dari partisipasi publik dalam mengawasi pertanggungjawaban kinerja pemerintah.

<sup>1</sup> United Nations Economic and Social Commissions for Asia and The Pacific, *What is Good Governance?*, (n.d.), <<https://www.unescap.org/sites/default/files/good-governance.pdf>>, diakses 5 Desember 2023.

<sup>2</sup> Miqdad Haqqony, *Implementasi Kebijakan Festival Anggaran Tahun 2016 di Kabupaten Batang*, (2018), hlm. 6.

<sup>3</sup> Loc.cit

Tidak hanya peran serta publik, kelancaran pelaksanaan Festival Anggaran Batang juga tidak meninggalkan dukungan dari lembaga anti korupsi dan kelompok masyarakat, seperti Laskar Batang, *Transparency International Indonesia* (TII), *Indonesia Corruption Watch* (ICW), Ombudsman RI, BPK, dan Kementerian lain.

Langkah inovatif Pemerintah Kabupaten Batang dalam memberikan wadah keterbukaan informasi program dan anggaran dari seluruh SKPD juga menyelenggarakan Forum Manajemen yang dihadiri oleh Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama, dan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil dengan tujuan untuk berbagi wawasan dan pengalaman mereka dalam mengelola anggaran serta mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat daerah. Forum tersebut digunakan sebagai pemberi dorongan dalam berbagi pengetahuan guna meningkatkan kapasitas manajerial di antara pemerintah daerah.

Selama prosesnya, Program Festival Anggaran menuai berbagai apresiasi, termasuk dari Deputi Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN RB) Bidang Pelayanan Publik, Mirawati Sudjono. Dirinya menilai Festival Anggaran sebagai wadah sosialisasi interaktif yang memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan keikutsertaan masyarakat. Respon masyarakat terhadap Festival Anggaran Kabupaten Batang secara umum sangat positif. Festival ini memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat mengenai operasionalisasi arah dan penggunaan anggaran. Sebagai contoh, Laning (19), warga Kecamatan Limpung, Batang, mengatakan bahwa festival ini memberikan informasi baru tentang penggunaan APBD, tempat wisata hasil kerjasama Pemkab Batang dan pengembangan inovasi desa, bahkan dapat Ia mengetahui dengan jelas rincian gaji bupati dan wakil bupati yang disajikan pada festival ini. Laning mengaku sempat terkejut melihat nominal gaji bupati tidak terlalu besar dan masih dipotong iuran wajib pegawai, BPJS, dan PPh Pasal 21.

NO	URAIAN	BUPATI	WAKIL BUPATI
1	2	3	4
	Gaji pokok	2.100.000	1.800.000
	Tunjangan keluarga	294.000	-
	Tunjangan jabatan	3.780.000	3.240.000
	Tunjangan beras	289.680	72.420
	Tunjangan PPh/Tunjangan khusus	113.638	
	Pembulatan gaji	20	80
	BPJS	71.820	54.000
	<b>Jumlah kotor</b>	<b>6.649.358</b>	<b>5.255.067</b>
	Potongan-potongan :		
	Iuran wajib pegawai	239.400	180.000
	BPJS	71.820	54.000
	PPh pasal 21	113.838	68.567
	Jumlah potongan	425.058	322.557
	<b>Jumlah bersih per bulan</b>	<b>6.224.300</b>	<b>4.932.500</b>

Sumber : detik.com

Hal ini sejalan dengan tujuan Bupati Kabupaten Batang dalam menyelenggarakan Festival Anggaran, yaitu untuk mewadahi keterbukaan informasi kepada masyarakat karena APBD merupakan dana yang berasal dari rakyat sehingga masyarakat harus memiliki pengetahuan tentang bagaimana dana tersebut digunakan. Informasi yang disampaikan secara terbuka di Festival Anggaran mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam proses pengambilan keputusan dan mengawasi apakah anggaran tersebut benar-benar mencerminkan kebutuhan dan prioritas masyarakat. Hal ini menjadi pondasi utama untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan publik. Dengan adanya keterbukaan informasi tentang penggunaan anggaran secara jelas dan terstruktur, masyarakat memiliki akses yang lebih baik untuk memahami alokasi dana dan capaian yang dihasilkan oleh setiap SKPD. Prestasi Pemerintah Kabupaten Batang dalam menyelenggarakan Festival Anggaran menjadi inspirasi bagi pemerintah daerah lain di Indonesia dalam meningkatkan transparansi, membangun hubungan saling percaya antara pemerintah dan masyarakat, dan memperkuat tata kelola keuangan pemerintah.

Upaya nyata Pemerintah Kabupaten Batang dalam mewujudkan transparansi dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan anggaran melalui penyelenggaraan Festival Anggaran mendapat sorotan di tingkat nasional. Meski program semacam Festival Anggaran belum pernah dilakukan di Indonesia dan dianggap “gila” oleh Direktur Jenderal Pertimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Budiarto Teguh Widodo (Radar Pekalongan News, 2014), tetapi Pemerintah Kabupaten Batang berhasil melaksanakan festival anggaran dengan hasil yang signifikan. Dengan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam hal pengawasan anggaran, serta kesadaran birokrat untuk memastikan efektivitas dan efisiensi dari setiap penggunaan anggaran. Keberhasilan ini menunjukkan kemampuan dan kreativitas Bupati Yoyok dan Pemerintah Kabupaten Batang dalam mengelola anggaran dengan cara yang

inovatif. Langkah progresif ini tidak hanya menyegarkan tata kelola keuangan daerah, tetapi juga menunjukkan bahwa inovasi diperlukan untuk dapat membawa dampak positif khususnya bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan daerahnya.

Festival Anggaran yang diadakan oleh Pemerintah Kabupaten Batang tidak hanya sekedar forum untuk menyajikan informasi mengenai alokasi anggaran. Kebijakan ini juga menjadi wadah untuk mengedukasi masyarakat mengenai penggunaan dan alokasi dana publik. Dengan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat mengenai penggunaan dan alokasi dana publik. Dengan cara ini, masyarakat tidak hanya diberikan gambaran umum tentang anggaran, tetapi juga diberdayakan dengan pengetahuan yang lebih khusus dan kontekstual. Lebih lanjut, pemahaman yang mendalam terhadap alokasi dana publik dan rasionalitas di balik kebijakan anggaran menjadi kunci bagi partisipasi masyarakat yang efektif. Dengan pemahaman yang lebih jelas mengenai cara dana publik dialokasikan dan mengapa keputusan tersebut diambil, masyarakat dapat lebih aktif dalam memberikan masukan dan penilaian yang konstruktif terhadap pengelolaan anggaran oleh Pemerintah Kabupaten Batang. Lebih dari itu, peningkatan pemahaman ini juga membuka jalan bagi masyarakat untuk lebih mengapresiasi dan menilai kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Batang.

Manfaat partisipasi aktif masyarakat dalam mendapatkan informasi publik terkait informasi penganggaran semakin nyata melalui Festival Anggaran. Partisipasi tersebut tidak hanya diharapkan, melainkan juga dihargai oleh pemerintah daerah. Inisiatif seperti ini tidak hanya memberikan dampak langsung dalam mewujudkan akuntabilitas pemerintah, tetapi juga memiliki dampak yang lebih luas, yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat akan urgensi keterlibatan mereka dalam setiap proses pemerintahan. Festival Anggaran tidak hanya menjadi acara tahunan semata, melainkan sebuah upaya untuk membangun hubungan yang lebih erat antara pemerintah daerah dan masyarakat, menciptakan fondasi yang kokoh untuk terwujudnya transparansi pemerintah yang efektif.

Selain itu, Festival Anggaran juga dapat berdampak positif pada pembangunan Kabupaten Batang karena pada Festival Anggaran, masyarakat juga diberikan kesempatan untuk dapat secara langsung bertanya kepada aparatur atau pejabat publik mengenai bagaimana penggunaan anggaran yang ada dan bagaimana program-program pembangunan yang sudah dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Batang. Selanjutnya, masyarakat juga dapat memberikan kritik maupun saran bagi pemerintah terkait dengan penggunaan anggaran dan program pembangunan, sehingga melalui Festival Anggaran, masyarakat dapat termotivasi untuk lebih memperhatikan dan peduli terhadap proses pembangunan di wilayah tempat tinggalnya. Ketika masyarakat peduli terhadap program-program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, maka pemerintah akan memiliki dukungan untuk menjalankan program-program pembangunannya. Masyarakat juga dapat menjadi kontrol bagi pemerintah, sehingga dimungkinkan dapat memberantas praktik KKN dan penguatan ekonomi daerah, sesuai dengan yang diharapkan oleh Yoyok Riyo Sudibyo dari diadakannya Festival Anggara.

Festival Anggaran juga membangun citra Kabupaten Batang yang lebih baik, program yang diinisiasi oleh Yoyok Riyo Sudibyo tersebut, mendapatkan banyak reaksi positif bahkan menjadi inspirasi bagi pemerintah daerah lainnya, hingga diadopsi oleh pemerintah daerah lainnya (Siregar & Arlena, 2017). Pada tahun 2016 hingga 2017, Pemerintah Kabupaten Karanganyar terinspirasi untuk mengadakan program yang serupa yaitu, pameran anggaran tahunan berjalan. Selanjutnya, program Festival Anggaran Kabupaten Batang juga menginspirasi pemerintah pusat Indonesia. Pada tahun 2017, Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan juga menyelenggarakan program serupa, berupa Open Portal Data APBN. Hal tersebut, membuat nama Kota Batang menjadi bersinar.

Sayangnya, program Festival Anggaran yang menjadi pelopor transparansi dan keterbukaan informasi bagi publik atas anggaran daerah Kabupaten Batang, mengalami hambatan dalam keberlanjutannya. Program tersebut tidak dilanjutkan oleh pemimpin Kabupaten Batang selanjutnya yaitu, Bupati Wahiji yang menggantikan Yoyok Riyo Sudibyo, pada saat masa tugasnya usai. Namun, Bupati Wahiji menerapkan transparansi dan keterbukaan informasi publik terkait pembangunan dan anggaran daerah melalui program *smart city* dan *e-Government*, tetapi program tersebut juga mengalami hambatan, dilansir dari laman resmi Kanal Berita Pemkab Batang, hingga tahun 2021 masih terdapat 33 desa yang tercatat sebagai area *blank spot* internet, dan pada tahun 2023 sebanyak 25 desa sudah berhasil mendapatkan sinyal, tetapi pemerintah Kabupaten Batang masih memiliki 8 desa yang belum mendapatkan akses internet dan baru akan secara bertahap diatasi pada tahun 2024.

## KESIMPULAN

Transparansi dan keterbukaan informasi publik merupakan instrumen penting dalam menjaga integritas dan kredibilitas pemerintahan. Masyarakat sudah seyakinya untuk mendapatkan akses terhadap informasi mengenai kebijakan, penganggaran, dan program-program yang dijalankan pemerintah. Melalui transparansi dan keterbukaan informasi publik, pemerintah yang bersih dan transparan akan terwujud. Pemerintah Kabupaten Batang, pada masa kepemimpinan Yoyok Riyo Sudibyo telah berhasil dalam mewujudkan transparansi dan keterbukaan informasi bagi masyarakat Kabupaten Batang, terkait dengan anggaran daerah dan program-program pembangunan Kabupaten Batang pada masanya. Yoyok Riyo Sudibyo bersama seluruh pemerintah Kabupaten Batang berhasil mewujudkan hal tersebut melalui program Festival Anggaran Kabupaten Batang. Program tersebut, bukan hanya berhasil mewujudkan transparansi dan keterbukaan informasi publik, tetapi membawa citra baik bagi Kabupaten Batang dan berhasil menginspirasi pemerintah daerah dan pusat lainnya.

## SARAN

Program Festival Anggaran Kabupaten Batang telah berhasil mewujudkan transparansi dan keterbukaan informasi kepada publik, tetapi pada masa pemerintahan Kabupaten Batang selanjutnya, program terkait upaya mewujudkan transparansi dan keterbukaan informasi publik yang semulanya adalah Festival Anggaran, digantikan dengan program *smart city* dan *e-Government*. Perubahan tersebut ditetapkan oleh pemimpin Kabupaten Batang yang menjabat pada tahun 2017-2022. Namun, masih terdapat masalah yang cukup besar dalam pelaksanaan program *smart city* dan *e-Government* tersebut, karena hingga tahun 2021 masih tercatat sebanyak 33 desa yang tidak memiliki akses internet di Kabupaten Batang, hal tersebut dapat menghambat transparansi dan keterbukaan informasi kepada masyarakat Kabupaten Batang dalam kurun waktu 2017-2022. Dengan demikian, sebaiknya pemerintah Kabupaten Batang setelah masa kepemimpinan Yoyok Riyo Sudibyo, tetap melaksanakan Festival Anggaran, sembari mengupayakan terlaksanakannya program pengganti tersebut dengan menyelesaikan masalah terkait akses internet pada desa-desa yang berada pada Kabupaten Batang, sehingga tidak akses masyarakat terhadap informasi mengenai anggaran dan program pembangunan pada Kabupaten Batang tidak terhenti di tahun 2016, terutama bagi masyarakat yang berada pada desa-desa yang belum mendapatkan akses internet tersebut.

## DAFTAR REFERENSI

A. Aziz, Y. ., and D. G. Manar, "Persepsi Masyarakat Batang Terhadap Festival Anggaran Pemerintah Kabupaten Batang (Studi Kasus Masyarakat Kecamatan Batang)," *Journal of Politic and Government Studies*, vol. 6, no. 03, pp. 81-90, Jun. 2017. [Online]. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/16585>

- Berita*. (2020, January 31). *Berita - Ombudsman RI*. Retrieved December 8, 2023, from <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--strategi-mewujudkan-transparansi-dan-partisipasi-dalam-pelayanan-publik>
- Berita*. Dugaan Korupsi Bupati Batang; Tiga Tahun Jadi Tersangka, Belum Pernah Diperiksa. (2011, July 27). *Indonesia Corruption Watch*. Retrieved December 5, 2023. <https://antikorupsi.org/id/article/dugaan-korupsi-bupati-batang-tiga-tahun-jadi-tersangka-belum-pernah-diperiksa>
- Berita*. PEMKAB BATANG ENTASKAN WILAYAH AREA BLANK SPOT INTERNET DI 33 DESA. (2023, August 15). *Berita Pemkab Batang*. Retrieved December 8, 2023, from <https://berita.batangkab.go.id/?p=1&id=11266>
- Cinintya, C. (2022). PENGARUH TRANSPARANSI DAN HASIL AUDIT LAPORAN KEUANGAN TERHADAP TINGKAT KORUPSI PADA PEMERINTAH PROVINSI DI INDONESIA [Undergraduate Dissertation ]. <https://digilib.unila.ac.id/66676/3/TEISIS%20FULL%20TANPA%20BAB%20PEMB%20AHASAN.pdf>
- Haqqony, M. (2018). Implementasi Kebijakan Festival Anggaran 2016 di Kabupaten Batang. (Skripsi, Universitas Indonesia). <https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/2019-3/20480451-T51872-Miqdad%20Haqqony.pdf#digital%23digital>
- Hendriyani, I. G. A. D. (2023). *Siaran Pers: Menparekraf: Semua Kalangan Berhak Dapat Kemudahan Akses Informasi Publik*. Kemenparekraf/Baparekraf RI. <https://kemenparekraf.go.id/berita/siaran-pers-menparekraf-semua-kalangan-berhak-dapat-kemudahan-akses-informasi-publik>
- Indriastuti, F., & Arif, A. (2017). *Empat pengawal uang rakyat*. KPG Gramedia. *Keterbukaan Informasi Publik, Kunci Sukses Penyelenggaraan Diklat yang Efektif dan Transparan*. (n.d.). BLDK Mahkamah Agung. Retrieved December 8, 2023, from <https://bldk.mahkamahagung.go.id/id/sekretariat-id/dok-keg-sekretariat-id/2574-keterbukaan-informasi-publik-kunci-sukses-penyelenggaraan-diklat-yang-efektif-dan-transparan.html>
- Leisher, S. H., & Nachuk, S. (2006). *Making Services Work for the Poor in Indonesia*. MA: Harvard University.
- OECD. (2002). *OECD Best Practices for Budget Transparency*. <https://www.oecd.org/governance/budgeting/Best%20Practices%20Budget%20Transparency%20-%20complete%20with%20cover%20page.pdf>
- Radar Pekalongan. (2014). *Radar pekalongan 13 februari 2014 by Radar Pekalongan - Issuu*. Issuu.com. [https://issuu.com/radarpekalonganpaper/docs/radar\\_pekalongan\\_13\\_februari\\_2014](https://issuu.com/radarpekalonganpaper/docs/radar_pekalongan_13_februari_2014)
- Rahayu, A. Y. S., & Juwono, V. (2018). *Birokrasi dan Governance Teori, Konsep dan Aplikasinya*. Rajawali Pers.
- Saat Pengunjung Festival Anggaran Kaget Mendengar Gaji Bupati Batang*. (2016, March 13). detikNews. Retrieved December 8, 2023, from <https://news.detik.com/berita/d-3163598/saat-pengunjung-festival-anggaran-kaget-mendengar-gaji-bupati-batang>
- Sejarah-ppid*. (n.d.). Ppid.mpr.go.id. <https://ppid.mpr.go.id/site/v/sejarah-ppid>
- Siregar, Rachmi & Arlena, Wenny. (2017). KOMUNIKASI ORGANISASI TATA KELOLA ANGGARAN DAERAH (Studi Kasus Festival Anggaran III-2017 Pada Pemerintah Kabupaten Batang, Jawa Tengah). *Avant Garde*. 5(2):1. DOI: <http://dx.doi.org/10.36080/avg.v5i2.621>
- Schiavo-Campo, S., Tomasi, D. (1999). *Managing Government Expenditure*. Manila: Asia Development Bank.

- Tahir, A. (2011). *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: PT. Pustaka Indonesia Press.
- Tahir, A. (2013). KRITIK TRANSPARANSI DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH. *UNG PRESS*. <https://repository.ung.ac.id/karyailmiah/show/234/kritik-transparansi-dalam-sistem-pemerintahan-daerah.html>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- United Nations Economic and Social Commissions for Asia and The Pacific. (n.d.) *What is Good Governance?* [www.unescap.org/sites/default/files/good-governance.pdf](http://www.unescap.org/sites/default/files/good-governance.pdf)